



Vol. 1
Masa Persidangan I
Okt — Des 2024



UPDATE

BANG DEWAN

MUHAMMAD KHOLID



**Wawancara
Eksklusif
tentang
PPN 12%**

**Prioritaskan
Pembahasan
RUU Perampasan
Aset!**

**Berantas
Tuntas
Pinjol Ilegal
dan Judol!**

”

KEBEBASAN

TANPA KEDISPLINAN

akan

MENGHADIRKAN

ANARKISME.

KEDISIPLINAN

TANPA ADA
RUANG KEBEBASAN

akan

MELAHIRKAN

OTORITARIANISME

- PROF. DR. ING. BJ HABIBIE -



Scan QR code ini untuk dengar
Salam Hangat dari Bang Kholid

SAMBUTAN PRESIDEN PKS



H. AHMAD SYAIKHU

Presiden

Partai Keadilan Sejahtera

Di usianya yang belum genap 40 tahun, Bang Kholid terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Daerah Pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi. Meski masih muda dan baru 4 bulan menjadi Wakil Rakyat, kiprahnya menyuarkan aspirasi masyarakat patut diapresiasi.

Bang Kholid menunjukkan dirinya sebagai sosok yang aspiratif, responsif, kritis juga tegas dan lantang di parlemen. Itu semua tergambar jelas dari buku laporan kinerja ini.

Terbitnya buku laporan kinerja ini menunjukkan pula bahwa beliau mempunyai kesadaran kuat untuk mempertanggungjawabkan amanah yang kini diembannya. Dan salah satu caranya dengan mempublikasikan sepaik terjangnya, baik di parlemen maupun di daerah pemilihan (Dapil).

Selamat dan sukses selalu untuk Bang Kholid.

SAMBUTAN KETUA FRAKSI PKS DPR - RI

Bang Kholid adalah anak muda yang kini menjadi bagian dari pejuang politik Fraksi PKS DPR RI. Tentu kehadirannya merupakan energi baru bagi Fraksi PKS dalam memperjuangkan dan membela kepentingan umat, kepentingan rakyat, dan menjaga NKRI.

Kehadirannya juga membawa oase bagi anak muda bahwa berjuang melalui jalur politik adalah pilihan yang rasional dan terhormat--asal mau bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas. Sehingga anak muda bukan hanya pantas karena punya elektabilitas tapi juga menghasilkan kerja-kerja yang berkualitas ketika ada di pentas (politik).

Buku Laporan Kinerja yang dibuat untuk menampilkan kiprah perjuangan Muhammad Kholid sebagai Anggota Fraksi PKS ini adalah bukti nyata bahwa kerja-kerja berkualitas itu perlu disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga rakyat bukan hanya merasa punya wakil tapi juga punya andil dalam perbaikan negeri ini.

Buku Laporan Kinerja ini adalah tradisi yang baik yang dicontohkan oleh para Anggota Fraksi PKS sebagai manifestasi visi Fraksi PKS DPR RI menjadi yang terdepan dalam kerja-kerja parlemen untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, adil dan sejahtera. Semoga Allah meridhoi. Aamiin.



DR. H. JAZULI JUWAINI, M.A.

Ketua Fraksi PKS DPR-RI

GET TO KNOW

PROFIL BANG DEWAN

H. Muhammad Kholid, S.E., M.Si.

Mengenyam **Pendidikan Formal** tingkat TK - **SMA** di **Kabupaten Jember** dan **Lumajang**, Jawa Timur

Memperoleh **Sarjana Ekonomi** di **FEB UI** dan **Pascasarjana HI FISIP UI**

Aktivis, BPM dan **DPM UI**.
Ketua BEM FE UI
2009

Lulusan Terbaik FEB UI Bidang
Kepemimpinan
2011

Lulusan Terbaik Pascasarjana HI FISIP UI
2021

Alumni Sekolah Pemimpin Politik Muda se-Asia
(Singapura, Malaysia, Sri Lanka, dan Jerman)
2016- 2017

Direktur RETAS Institute
2020-sekarang

Founder Kholid Academy

Lahir di **Jember**, **26 Maret 1986**. Menikah dengan **Rizky Eka Putri** dikaruniai **2 Putra**

Staf Khusus Presiden PKS
2015 - 2025

Juru Bicara DPP PKS
2019 - sekarang

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga
2019

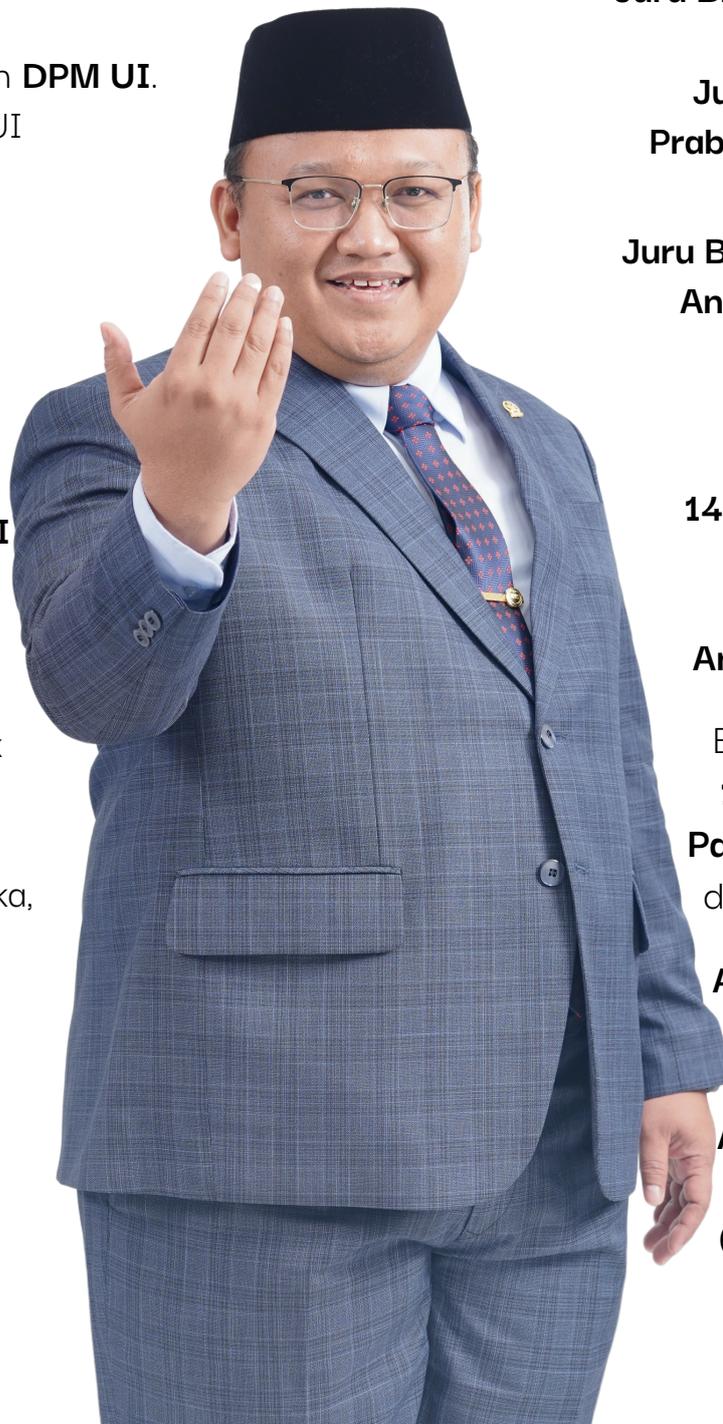
Juru Bicara Nasional Anies - Muhaimin (AMIN)
2024

Berpengalaman **14 Tahun** sebagai **Tenaga Ahli Pimpinan** dan **Anggota DPR RI**

Berhasil **Meraih 107.251 Suara** Pada **Pileg 2024** di Dapil **Jabar VI**

Anggota Komisi XI DPR RI
2024 - 2029

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
2024 - 2029



PEMBEKALAN ANGGOTA DPR RI DALAM PROGRAM LEMHANAS RI

September 2024

Pelaksanaan pembekalan wawasan kebangsaan bagi anggota DPR RI baru yang dilantik pada 1 Oktober 2024 berlangsung dari 21 hingga 28 September 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan KPU dan Lemhannas RI, bertujuan untuk mempersiapkan anggota baru dengan pemahaman mendalam mengenai wawasan kebangsaan dan geopolitik Indonesia.



Melalui program ini, anggota DPR RI dapat belajar dari para ahli dan praktisi berpengalaman di bidangnya, yang diharapkan dapat memperkuat peran DPR RI dalam pengambilan keputusan strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program ini memberikan wawasan mendalam tentang isu-isu strategis yang dihadapi bangsa, termasuk keamanan, ekonomi, dan sosial.

Selain meningkatkan pengetahuan, pelatihan ini juga membangun jaringan antar anggota DPR RI. Manfaat jangka panjang dari pembekalan ini adalah peningkatan kualitas legislasi yang dihasilkan, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Diharapkan, dengan adanya pembekalan ini, anggota baru dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.



“

Lemhanas mengajari arti penting nilai-nilai cinta tanah air, ketahanan nasional serta posisi dan peran strategis Indonesia dalam landscape ekonomi dan politik global yang sangat dinamis, kompetitif, dan terkadang menghadapi banyak turbulensi dan ketidakpastian

ujar Bang Kholild terkait Pembekalan Anggota DPR RI oleh Lemhanas RI

BANG KHOLID DILANTIK SEBAGAI ANGGOTA DPR-MPR RI PERIODE 2024 - 2029

Oktober 2024

Pada tanggal 1 Oktober 2024, Muhammad Kholid resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024-2029. Acara pelantikan yang berlangsung di gedung DPR-MPR RI ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting di politik dan pemerintahan RI serta keluarga dan kerabat dari para anggota yang dilantik. Suasana pelantikan tersebut penuh dengan semangat dan harapan baru, seiring dengan munculnya wajah-wajah baru yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara.



Foto : Bang Kholid bersama keluarga besar



Bang Kholid menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh konstituen yang telah mempercayainya mengemban amanah sebagai anggota DPR RI. Ia menekankan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Bang Kholid akan berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional dan menjadi wakil rakyat yang amanah serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, mewakili suara rakyat, serta berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.



Foto : Bang Kholid bersama istri dan kedua putranya

YANG MUDA YANG BERPARLEMEN

Anggota DPR RI Muda PKS

Periode 2024 – 2029

Berikut ini adalah anak-anak muda PKS yang berhasil tembus ke Senayan sebagai anggota DPR RI



H. Muhammad Kholid, S.E., M.Si.

📍 mkholid86

Lahir : 26 Maret 1986
Pendidikan:
S1 - Ilmu Ekonomi FEB UI
S2 - Hubungan Internasional UI
Dapil: Jawa Barat VI
Amanah: **Komisi XI** (Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Moneter) & **Badan Legislasi**



Habib Idrus Salim Aljufri, LC., M.B.A.

📍 idrusjufrie

Lahir : 28 Oktober 1985
Pendidikan:
S1 - Syariah Universitas Islam Madinah
S2 - Islamic Banking and Finance International Islamic University Malaysia (IIUM)
Dapil: **Banten III**
Amanah: **Komisi I** (Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi) & **Badan Akuntabilitas Keuangan Negara**



dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed.

📍 gamalalbinsaid

Lahir : 8 September 1989
Pendidikan:
S1 - Kedokteran Universitas Brawijaya
S2 - Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Dapil **Jawa Timur V**
Amanah: **Komisi X** (Pendidikan, Olahraga, Kebudayaan) & **Badan Legislasi**



Ismail Bachtiar, S.K.M., M.M.

📍 ismailbachtiar

Lahir: 3 Juli 1992
Pendidikan:
S1 - Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
S2- Manajemen, ABS.
Dapil: **Sulawesi Selatan VII**
Amanah: **Komisi VI** (Perdagangan, BUMN, Koperasi) & **Badan Anggaran**



H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP.

📍 rahmatsaleh_01

Lahir: 27 April 1983
Pendidikan:
S1 Farmasi Unand
S2 Ilmu Politik Unand
Dapil: **Sumbar I**
Amanah: **Komisi II** (Dalam Negeri, Pertanahan, Reformasi Birokrasi) & **Badan Anggaran**



Hj. Meity Rahmatia, S.E., S.Pd., M.M.

📍 meityrahmatia_mw

Lahir: 27 Mei 1981
Pendidikan:
S1 Pendidikan - Universitas Negeri Makassar
S2 Ekonomi - Universitas Negeri Makassar
Dapil: **Sulawesi Selatan I**
Amanah: **Komisi XIII** (Hukum, HAM, dan Imigrasi)



Izzudin Alqasam Kasuba

📍 alqassam_kasuba

Lahir: 3 Desember 1992
Pendidikan:
S1 - WISE University, Yordania
Dapil: **Maluku Utara I**
Amanah: **Komisi VII** (Industri, Pariwisata, dan UMKM)



Hj. Meitri Citra Wardani, S.H.

📍 meitricitrawardani

Lahir: 3 Mei 1994
Pendidikan: **S1 Hukum Universitas Surabaya**
Dapil: **Jawa Timur VIII**
Amanah: **Komisi XII** (Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup)

BANG KHOLID MENGHADIRI UPACARA PELANTIKAN PRESIDEN RI TERPILIH PERIODE 2024 - 2029

Oktober 2024



FOTO : SETKAB RI

Pada 20 Oktober 2024, Bang Kholid menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke- 8 dalam Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2024-2029, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.



FOTO : DOKUMEN PRIBADI ISTIMEWA

“

Demi Allah
 saya bersumpah akan
memenuhi
kewajiban Presiden
Republik Indonesia
 dengan
sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya
 memegang teguh
Undang-Undang Dasar
 dan **menjalankan segala**
undang-undang dan
peraturannya dengan
selurus-lurusnya serta
berbakti kepada nusa
 dan **bangsa**

— Sumpah Presiden Prabowo Subianto



RESPON PIDATO PERDANA PRESIDEN, BANG KHOLID : DUKUNG AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN PRABOWO!

- Presiden Prabowo menyampaikan pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024.
- Dalam pidatonya, presiden menekankan perlunya pemberantasan korupsi dan kolusi yang masih menjadi masalah serius di negara ini. Ia menyerukan agar semua pihak berani introspeksi dan memperbaiki diri, serta mengakui adanya kebocoran anggaran dan penyelewengan yang harus diatasi dengan keberanian, transparansi, dan digitalisasi proses perencanaan dan penggunaan anggaran negara.
- Bang Kholid menyambut baik komitmen anti korupsi Pak Prabowo dan mendukung agar terwujud dalam tindakan dan kebijakan.

“
Kita harus menghadapi kenyataan, bahwa **masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita.** Saya sudah katakan kita **harus berani menghadapi dan memberantas korupsi** dengan **perbaikan sistem melalui digitalisasi dan penegakan hukum yang tegas.** InsyaAllah kita akan **kurangi korupsi secara signifikan.**”

*Kutipan Pidato
Presiden Prabowo Subianto*

- Presiden Prabowo Subianto juga mencanangkan swasembada pangan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber makanan dari luar, serta swasembada energi untuk memastikan ketahanan energi nasional. Prabowo juga menyoroti pentingnya pengelolaan air yang baik dan penyaluran subsidi langsung kepada keluarga yang membutuhkan, dan agar setiap anak dapat mengakses makanan bergizi.
- Selain itu, ia menekankan perlunya hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta penegakan hukum yang tegas. Dalam konteks demokrasi, Prabowo menyerukan penerapan demokrasi yang khas Indonesia, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa.

“Pidato Pak Prabowo patut kita sambut dengan gembira dan suka cita. Namun, pemberantasan korupsi membutuhkan satu padunya antara kata dan perbuatan. Semoga Pak Prabowo berhasil mewujudkan komitmennya,”

ujar Bang Kholid merespon pidato Presiden Prabowo.

Did You Know?

FUNGSI ANGGOTA DPR RI

LEGISLASI



DPR bertanggung jawab **membuat Undang-undang bareng Pemerintah** dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat

ANGGARAN



DPR **menolak** atau **menyetujui rancangan APBN** dari pemerintah.

PENGAWASAN



DPR melakukan **pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang** dan **kebijakan pemerintah**, termasuk hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

REPRESENTASI



DPR **memperjuangkan aspirasi** daerah pemilihan.

HAK ANGGOTA DPR RI

INTERPELASI



Anggota DPR dapat **meminta penjelasan kepada pemerintah** mengenai **kebijakan tertentu yang dianggap penting**.

ANGKET



Anggota DPR **berhak melakukan penyelidikan** terhadap **kebijakan pemerintah** yang diduga **merugikan kepentingan publik**.

MENYATAKAN PENDAPAT



Hak Konstitusional Anggota DPR RI untuk **menyatakan pendapatnya** bahwa **ada atau tidaknya pelanggaran konstitusional** yang **dilanggar** oleh **Presiden** atau **Wakil Presiden** dalam menjalankan tugasnya.

IMUNITAS



Anggota DPR **dilindungi dari tuntutan hukum** terkait pernyataan dan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya.

DPR RI TAMBAH DUA KOMISI DAN SATU BADAN



Mengikuti **penambahan jumlah menteri** di kabinet Presiden Prabowo Subianto, ada tambahan **dua komisi baru** di DPR RI, yaitu **Komisi XII (membidangi energi dan sumber daya mineral)** dan **Komisi XIII (bidang hukum, reformasi, dan HAM)**.



Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di DPR RI **dibentuk** untuk **menampung dan mengakomodasi aspirasi** serta kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga dapat **menjadi jembatan** antara rakyat dan lembaga legislatif.

REKAM JEJAK PERJUANGAN PKS

- **PKS** adalah **satu-satunya partai** yang **menolak disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021** tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengamatkan **kenaikan PPN 12%**.
- **PKS** juga **satu-satunya partai** yang **menolak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menjadi dasar dari **Opsen (tambahan pajak) kendaraan bermotor sebesar 66%**.



Siapa Saja Wakil di Dapil Kita?

PKS berhasil meraih 2 kursi DPR RI dan 3 kursi DPRD Provinsi di daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi. Berikut ini adalah nama-nama wakil kita di DPR RI dan DPRD Provinsi.

Anggota DPR RI

Dapil Jawa Barat VI

(Kota Depok dan Kota Bekasi)

2 dari 6 kursi
diisi oleh PKS



**H. MUHAMMAD
KHOLID, S.E., M.SI.**



**H. MAHFUDZ
ABDURRAHMAN, S.SOS.**

Anggota DPRD Provinsi

Dapil Jawa Barat VIII

(Kota Depok dan Kota Bekasi)

3 dari 11 kursi
diisi oleh PKS



**HJ. LILIS NURLIA,
S.PD.I., M.PD.**



HJ. ELLY FARIDA



**HJ. IIN NUR
FATIMAH, A.MD.**

Anggota DPRD Kota Depok



PKS berhasil meraih **13** dari **50** kursi **DPRD Kota Depok** dan menempatkan **Ade Supriyatna** sebagai **Ketua DPRD Kota Depok**

Dapil 1

1. H. Moh. Hafid Natsir, Dipl.Ing.
2. H. Imam Musanto, S.Pd, M.M.

Dapil 2

1. Ubaidilah, S.E.I.
2. H.T.M. Yusufsyah Putra, M.Si.

Dapil 3

1. H. Ade Supriyatna, S.T., M.A.P.

Dapil 4

1. Hengky, S.T., M.Sos.
2. Mohamad Nur Hidayat, S.Pd.

Dapil 5

1. Dr. Hj. Nuryuliani, S.Kom., M.M.
2. Ade Firmansyah, S.H.
3. Dr. H. Bambang Sutopo, S.E.I., M.M.

Dapil 6

1. H. Khairullah Ahyari
2. Habib Syarif Gasim Husin Al Attas
3. Hj. Ela Dahlia



Anggota DPRD Kota Bekasi



PKS berhasil meraih **11** dari **50** kursi **DPRD Kota Bekasi** dan berhasil menempatkan **Sardi Efendi** sebagai **Ketua DPRD Kota Bekasi**.

Dapil 1

1. Adhika Dirgantara, S.Kom.
2. H. Bambang Purwanto

Dapil 2

1. Muhammad Kamil, S.E.I.
2. Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M.

Dapil 3

1. H. Alimudin, S.Pd.I., M.Si.
2. Siti Mukhliso, S.Ag., M.Ag.

Dapil 4

1. Latu Har Hary, S.Sn.
2. Hj. Ii Marlina, S.Pd.

Dapil 5

1. Fendaby Surya Putra, B.Eng.
2. H. M. Saifuddaulah, S.H., M.H., M.Pd.I.
3. Ir. Hj. Chairun Nisa, M.M.

BANG KHOLID DITETAPKAN SEBAGAI ANGGOTA KOMISI XI DPR RI

Oktober 2024

Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada 22 Oktober 2024 telah menyetujui nama-nama keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI untuk masa keanggotaan 2024-2029, yang mencakup Komisi I hingga XIII.

Muhammad Kholid ditetapkan sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang memiliki tugas mengawasi dan membahas kebijakan di bidang keuangan, perbankan, dan pembangunan nasional. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta pengelolaan keuangan negara oleh kementerian dan lembaga terkait.



CERITA DI BALIK SIDANG

Ada hal menarik dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan. Bang Kholid memiliki pantun spesial buat Bu Sri Mulyani. Bang Kholid berpantun, “Jalan-jalan ke Kota Bekasi, Pulangnya beli kemeja. Dulu saya muridnya Bu Sri Mulyani, Sekarang jadi Mitra Kerja.” Dulu saat mahasiswa Baru di FEB UI, memang benar Bang Kholid adalah salah satu mahasiswa Bu Sri Mulyani. Tahun pertama menginjakkan kaki di FEB UI, Bu Sri Mulyani adalah dosen tamu. Ia mengajarkan Pengantar Ilmu Ekonomi sebagai Dosen Pengajar di FEBUI yg juga seorang Menteri Keuangan RI di era Presiden SBY periode pertama (2004-2009). Namun sekarang Bang Kholid bisa menjadi mitra kerja beliau dan ikut mengawal penyusunan APBN 5 tahun mendatang. Dari ruang kuliah ke ruang sidang di parlemen, doakan semoga Bang Kholid bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya.



“
**Jalan-jalan
 ke Kota Bekasi
 Pulangnya
 beli kemeja
 Dulu saya
 muridnya bu
 Sri Mulyani
 Sekarang jadi
 Mitra Kerja**

pantun Bang Kholid untuk
 Bu Sri Mulyani

DAFTAR MITRA KERJA KOMISI XI DPR RI



1 Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan bertugas mengelola keuangan dan kekayaan negara untuk mendukung pemerintahan.

6

Bank Indonesia (BI)



Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan nasional serta merumuskan kebijakan moneter dan mengawasi perbankan.



2 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Kementerian PPN/BAPPENAS bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan nasional serta menghubungkan pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan.

7

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



OJK bertugas mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, fokus pada perlindungan konsumen, pengembangan pasar keuangan, penegakkan hukum di sektor keuangan, dan ikut serta menjaga stabilitas sistem keuangan.



3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

LKPP bertugas merumuskan kebijakan dan mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan memastikan penerapan prinsip good governance.

8

Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Setjen BPK)



Setjen BPK bertugas mendukung Badan Pemeriksa Keuangan dalam audit pengelolaan keuangan negara, penyusunan laporan, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi.



4 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

LPS bertugas menjamin simpanan nasabah di bank, menjaga stabilitas sistem perbankan, dan mengelola dana penjaminan serta melakukan penyelamatan terhadap bank yang mengalami kesulitan.

9

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)



LPEI bertugas mendukung pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan, layanan konsultasi, dan program-program yang meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.



5 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP bertugas mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan negara serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan penggunaan anggaran pemerintah.

10

Badan Usaha Milik Negara



BUMN yang menerima Penyertaan Modal Negara dari APBN dan di bawah kendali Kemenkeu bertugas menyediakan barang dan jasa publik serta berkontribusi terhadap pendapatan negara



Scan untuk melihat lebih lengkap
Anggota DPR RI F-PKS Setiap Komisi

BANG KHOLID DITETAPKAN SEBAGAI ANGOTA BADAN LEGISLASI (BALEG) DPR RI

Oktober 2024



Rapat Pleno Baleg perdana menetapkan anggota Baleg DPR RI adalah AI Muzammil Yusuf sebagai Kapoksi Baleg PKS dengan anggota: Ledia Hanifa Amalia, Muhammad Kholid, Gamal Albinsaid, Anis Byarwati, Reni Astuti, Hendry Munief, dan Ahmad Rukyot.

Prolegnas 2025 menetapkan ada 41 RUU yang menjadi prioritas tahun 2025 dan 178 RUU untuk periode 2025-2029.

Fraksi PKS mengusulkan beberapa RUU prioritas, seperti RUU Fakir Miskin, RUU Kewirausahaan Nasional, RUU Keadilan-Perubahan Iklim, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Perampasan Aset.



“

Kami berharap Badan Legislati

can dapat mewujudkan meaningful participation

(partisipasi yang bermakna)

dalam proses pembuatan Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi mensyaratkan

ada 3 partisipasi masyarakat yang harus dipenuhi oleh DPR RI :

- (1) hak warga untuk didengarkan pendapatnya**
(*right to be heard*)
- (2) hak warga untuk dipertimbangkan pendapatnya**
(*right to be considered*)
- (3) hak warga untuk diberikan penjelasan**
(*right to be explained*)

— Kutipan Bang Kholid tentang Baleg DPR RI

WAWANCARA EKSKLUSIF TENTANG KEBIJAKAN PPN 12%

November 2024

Mengapa pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12%?

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tepatnya diatur dalam Bab IV Pasal 7 ayat (1). Pasal tersebut mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022 (huruf a), dan kemudian menjadi 12 persen paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 (huruf b). Karena ini merupakan perintah undang-undang, pemerintah wajib melaksanakannya.

Namun, ada jalan keluar jika pemerintah ingin menunda atau meninjau ulang kebijakan ini:

Pertama, Presiden dapat mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk menunda atau mengubah implementasi kenaikan tarif ini.

Kedua, melalui APBN Perubahan tahun 2025, pemerintah dapat menggunakan Pasal 7 ayat (3) dan (4) dari UU HPP yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan tarif PPN tertentu melalui Peraturan Pemerintah (PP) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.



Foto: Bang Kholid Menjelaskan Kebijakan PPN di Tv One



Bisa diceritakan bagaimana sejarah UU HPP ini lahir? Siapa inisiatornya?

UU HPP lahir atas inisiatif Pemerintah era Presiden Joko Widodo. Setelah pandemi COVID-19, pemerintah merasa perlu melakukan reformasi perpajakan untuk memperkuat basis penerimaan negara dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari agenda tersebut, pemerintah mengajukan RUU HPP ke DPR.

Dalam pembahasan RUU HPP di DPR, Ketua Panitia Kerja (Panja) adalah dari Fraksi PDI Perjuangan. PDIP sangat mendukung dan bahkan memimpin jalannya pembahasan. Semua fraksi di DPR menyetujui RUU HPP ini untuk disahkan, kecuali PKS. Kami dari PKS adalah satu-satunya fraksi yang konsisten menolak, karena kami melihat dampaknya akan membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Bagaimana sikap PKS terhadap kebijakan kenaikan PPN 12 persen?

Kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kami memahami bahwa pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang berat, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, sejak awal, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah satu-satunya partai yang menolak RUU HPP. Kami menolak kebijakan kenaikan PPN secara bertahap, dari 10 persen ke 11 persen, dan sekarang ke 12 persen per 1 Januari 2025. Sikap ini konsisten karena kami memprioritaskan kepentingan rakyat, khususnya kelas menengah ke bawah yang paling terdampak.

Apa alasan utama PKS menolak kenaikan PPN 12 persen?

Ada beberapa alasan mendasar. **Pertama**, sifat pajak PPN itu regresif. Artinya, beban pajak ini paling berat dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah, karena mereka menghabiskan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan konsumsi. Ini menimbulkan ketidakadilan sosial.

Kedua, daya beli masyarakat saat ini terus melemah. Selama lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah di Indonesia berkurang hampir 10 juta orang. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam situasi seperti ini, masyarakat justru membutuhkan stimulus ekonomi dan pemotongan pajak, bukan tambahan beban berupa kenaikan pajak.



Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI

Apakah PKS tetap menolak kenaikan PPN?

Kami konsisten dengan sikap kami sebelumnya saat pembahasan RUU HPP. Namun, kami juga memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah karena ruang fiskal yang semakin terbatas dan butuh tambahan penerimaan negara. Solusi Presiden Prabowo yang memberikan kenaikan pajak hanya kepada barang mewah adalah solusi yang tepat.

Alhamdulillah, **kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang memutuskan bahwa kenaikan PPN 12 persen hanya akan dikenakan pada barang-barang mewah.** Ini adalah kebijakan yang simpatik dan empatik. Dengan pendekatan seperti ini, beban masyarakat kecil dapat diminimalkan, sementara potensi penerimaan negara tetap terjaga.

Kalau PPN tidak dinaikkan, lalu menurut Bang Kholid apa solusinya?

Penerapan pajak kekayaan dan pajak karbon merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pajak kekayaan dapat dikenakan pada kelompok 1% hingga 5% terkaya melalui pajak progresif pada aset seperti properti mewah dan investasi, yang akan menciptakan redistribusi kekayaan yang lebih adil tanpa membebani mayoritas masyarakat kecil dan menengah. Sementara itu, pajak karbon (*carbon tax*) mendorong industri untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon sesuai *Paris Agreement*.

Selain itu, sumber daya tambang seperti batubara perlu dikenakan pajak dan royalti lebih tinggi agar penerimaan negara dari SDA mengalami peningkatan signifikan dan dapat dinikmati oleh mayoritas masyarakat, bukan hanya segelintir korporasi. Dengan pendekatan ini, penerimaan negara dapat meningkat tanpa membebani masyarakat kecil yang sudah menghadapi tantangan daya beli, mencerminkan keberpihakan kepada rakyat dan langkah strategis menuju keberlanjutan ekonomi dan lingkungan hidup atau ekologis.

DUKUNG VISI ANTI KORUPSI PRESIDEN PRABOWO, BANG KHOLID DORONG RUU PERAMPASAN ASET MASUK PROLEGNAS PRIORITAS 2025-2029

Oktober 2024



Muhammad Kholid, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi), menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg yang diadakan bersama PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), IPC (Indonesian Parliamentary Center), dan Komnas Perempuan. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, dan bertujuan untuk menyusun Prolegnas RUU tahun 2025-2029 serta Prolegnas RUU Prioritas tahun

2025. Dalam kesempatan tersebut, Bang Kholid mendorong agar RUU Perampasan Aset dimasukkan ke dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas.

Bang Kholid menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap RUU ini agar dapat memberikan dampak yang diharapkan. **“Sebagai mantan aktivis di Universitas Indonesia, saya sering mendengar pertanyaan dari teman-teman aktivis mengenai kapan RUU Perampasan Aset akan disahkan. Oleh karena itu, saya mohon agar RUU ini dikaji secara empiris untuk memahami implikasinya terhadap agenda pemberantasan korupsi,”** ungkap Bang Kholid kepada para narasumber RDPU. Ia juga menyoroti urgensi RUU Perampasan Aset, mengingat stagnasi kinerja pemberantasan korupsi selama sepuluh tahun terakhir, yang tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang tetap di angka 34.

“

Sesuai dengan visi anti korupsi Presiden Prabowo, RUU Perampasan Aset menjadi instrumen penting sebagai terobosan dalam agenda pemberantasan korupsi

karena **10 tahun terakhir Indeks Persepsi Korupsi (IPK) stagnan atau tidak mengalami perbaikan sama sekali.**

— Bang Kholid di rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI



Bang Kholid menutup pandangannya dengan mengingatkan bahwa publik menaruh harapan besar kepada pimpinan dan anggota Baleg DPR RI untuk merespons aspirasi masyarakat terkait RUU ini.

“Kita ingin menjadi DPR RI yang membawa harapan baru. Semoga kita bisa mewujudkannya,” tutup Bang Kholid.

ANTISIPASI KRISIS IKLIM, BANG KHOLID USULKAN RUU KEADILAN IKLIM MASUK PROLEGNAS PRIORITAS BALEG DPR RI

Oktober 2024

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Barat VI, Muhammad Kholid, mengusulkan agar RUU Keadilan Iklim segera dikaji dan dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2024, Bang Kholid menekankan pentingnya visi ekologis dalam Prolegnas, yang berkaitan dengan ketahanan ekologis dan pembangunan yang berkeadilan serta ramah lingkungan.



Bang Kholid meminta narasumber untuk mendalami isu Ketahanan Ekologis dan membandingkan berbagai konsep kebijakan untuk mengantisipasi krisis iklim. Ia menegaskan bahwa konsep "Keadilan Iklim" harus menjadi fokus, mengingat dampak perubahan iklim lebih banyak dirasakan oleh masyarakat terdampak dan kelompok rentan.



Keterangan foto: Indonesia Parliamentary Center (IPC) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

“

**Dalam VISI
Prolegnas 2025-2029,**

“Ketahanan ekologis”

menjadi salah satu visi penting agenda legislasi 5 tahun mendatang. Bahkan dari 5 misi Prolegnas tercantum dua kali:

**“Ketahanan Ekologis” dan
“pembangunan kewilayahan
yang berkeadilan
dan ramah lingkungan”**

**oleh karena itu saya
meminta agar Baleg DPR
RI menyetujui RUU
Keadilan Iklim masuk
ke dalam Prolegnas
prioritas 2025-2029**

*Bang Kholid di rapat Badan
Legislasi (Baleg) DPR RI*

RESPONS KEJATUHAN SRITEX, BANG KHOLID: PERKUAT INDUSTRI DAN UMKM DALAM NEGERI!

November 2024

Menanggapi pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, mendesak agar DPR RI segera membuat regulasi yang mencerminkan Nasionalisme Ekonomi yang diwariskan oleh Bung Hatta. Bang Kholid menegaskan pentingnya perlawanan terhadap impor ilegal yang merugikan industri tekstil Indonesia, dengan Sritex sebagai salah satu korbannya.



“

China telah menerapkan predatory pricing policy yang berdampak buruk pada industri dalam negeri kita, khususnya UMKM. Apalagi, barang impor ilegal juga masuk ke pasar dalam negeri kita secara masif telah memukul produk-produk UMKM kita

Jika sebagai anggota DPR RI kita diam saja dalam mengatasi hal ini, kepada siapa lagi masyarakat akan berharap?

—Bang Kholid

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara I, Senayan, Bang Kholid menjelaskan bahwa lanskap ekonomi politik global telah berubah dari neoliberalisme ke nasionalisme ekonomi, dengan contoh kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap kendaraan listrik (EV) dari China. Ia menekankan bahwa ideologi liberalisasi dan deregulasi sudah usang, dan perdagangan internasional kini mengarah pada proteksionisme. Derasnya produk impor dari China melemahkan pasar domestik dan produk kita jadi terpuruk. Oleh karena itu perlu ada regulasi yang berpihak kepada industri domestik. Selain itu, pesatnya produk impor ilegal juga menjadi ancaman tersendiri bagi industri domestik kita, sehingga perlu ada penegakan hukum yang tegas dan konsisten.



Foto : Tribunnews.com

BANG KHOLID DESAK OJK TOTALITAS BERANTAS PRAKTEK PINJOL ILEGAL DAN JUDOL!

November 2024

Dalam Rapat Kerja pada Senin, 18 November 2024, anggota Komisi XI DPR RI, Bang Kholid, menekankan perlunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih proaktif dalam menangani masalah pinjaman online (Pinjol) ilegal dan judi online (Judol) yang semakin marak. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisiner beserta anggota Dewan Komisiner OJK lainnya dan membahas kinerja OJK pada Triwulan III Tahun 2024 serta tantangan yang dihadapi sektor keuangan di Indonesia. Bang Kholid mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak negatif Pinjol ilegal dan Judol, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pembiayaan formal.



Bang Kholid mendorong adanya kolaborasi OJK, PPATK, dan penegak hukum untuk mengungkap aliran dana yang terkait dengan rekening Pinjol ilegal dan Judol sehingga pelaku yang terlibat dapat diungkap. Maraknya Judol dan Pinjol ilegal berdampak buruk ke industri keuangan sehingga OJK harus memprioritaskan penanganan dua hal ini sebagai agenda utama dalam kerja saat ini dan ke depan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya OJK dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, yang berdampak positif terhadap sektor keuangan secara keseluruhan.

OJK harus membuat industri jasa keuangan lebih mudah diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga UMKM tidak terjerat Pinjol ilegal maupun Judol.

“**Tidak cukup hanya menutup sekitar 8.000 rekening Judol** tetapi juga **OJK harus bekerjasama dengan PPATK menelusuri aliran uang** sehingga **akan terkuak siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab**”

—Bang Kholid

BANG KHOLID MINTA BAPPENAS BUAT ROADMAP MENUJU PERTUMBUHAN 8%

November 2024

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, mengemukakan masukan kepada Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy terkait rancangan roadmap pembangunan di pemerintahan Prabowo Subianto. Bang Kholid menekankan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun pada 2029, Bappenas harus memasukkan terobosan-terobosan inovatif dalam setiap program unggulan pemerintah. Ia menilai bahwa tanpa adanya langkah-langkah strategis yang jelas dan terukur, ambisi tersebut akan sulit tercapai, mengingat tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.



Foto: Ngobrol dengan menteri Bappenas, Pak Rachmat Pambudy



Lebih lanjut, Bang Kholid menegaskan bahwa keberhasilan roadmap pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan akuntabel. Ia mendorong Bappenas untuk melakukan evaluasi berkala terhadap setiap program yang diluncurkan, serta melibatkan masyarakat, khususnya civitas akademika, dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Bang Kholid juga menekankan tugas Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional untuk merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya integrasi antara program-program yang ada dengan kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Ia menyarankan agar Bappenas mengidentifikasi sektor-sektor prioritas, seperti sektor pangan, Energi Baru Terbarukan (EBT), ekonomi digital, perumahan rakyat, hilirisasi dan industrialisasi sektor sektor pertambangan Minerba, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu, kami minta agar Bappenas membuat roadmap dan strategi yang cermat bagaimana mencapai target tersebut.

perlu ada upaya terobosan-terobosan yang inovatif dan progresif.

— Bang Kholid

BANG KHOLID INGATKAN GUBERNUR BI TENTANG PERAN STRATEGIS BI DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG LEBIH TINGGI

Oktober 2024



Dalam rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan para Dewan Gubernur lainnya, anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid menyampaikan kritik tajam terkait kebijakan Bank Indonesia (BI) yang enggan menurunkan suku bunganya di tengah inflasi yang cukup rendah dan tren penurunan suku bunga Bank Sentral beberapa negara, termasuk The Fed.

Bang Kholid menegaskan bahwa tugas BI tidak hanya terbatas pada pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai rupiah, tetapi juga memastikan kebijakan moneter itu pro-growth.

Ia menginginkan BI berfungsi sebagai pendorong inovasi dan pertumbuhan yang inklusif, bukan hanya berputar pada tugas menjaga stabilitas nilai tukar.



“

Bank Indonesia punya peran strategis

dalam **mendorong pertumbuhan ekonomi** yang lebih tinggi. **BI harus memiliki *unconventional wisdom*** dalam mengelola target inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, namun **juga harus mampu menjadi akselerator tumbuhnya ekonomi** masyarakat secara ekspansif.

Hal ini sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan 8%

yang **ditetapkan oleh Presiden Prabowo.**

— Bang Kholid

Lebih lanjut, Bang Kholid mendorong kolaborasi antara BI dan pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Ia percaya bahwa keterlibatan BI dalam perencanaan pembangunan akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil saling mendukung dan berkontribusi pada pencapaian tujuan ekonomi nasional. Bang Kholid menekankan bahwa pendekatan komprehensif dan kolaboratif diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

BANG KHOLID DUKUNG PENGUATAN SISTEM E-AUDIT DI LKPP UNTUK MENCEGAH KEBOCORAN ANGGARAN

November 2024

Dalam pidato pelantikan Presiden Prabowo, penekanan pada pemberantasan korupsi melalui perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas dan digitalisasi menjadi sorotan utama. Anggota Komisi XI DPR RI, Bang Kholid, menggarisbawahi bahwa peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sangat krusial dalam konteks ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP memiliki tugas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan. Bang Kholid menekankan bahwa implementasi e-audit sebagai bagian dari digitalisasi harus dimaksimalkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi korupsi.



“

Teknologi e-audit ini jangan sampai hanya berfungsi untuk merekam data setelah dugaan tindakan korupsi terjadi, tapi harusnya juga dapat memberikan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mampu mendeteksi potensi dan peluang penyimpangan tindakan korupsi.

—Bang Kholid

Selain itu, Bang Kholid juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di LKPP. Meskipun teknologi memiliki peran penting, SDM yang kompeten dan tersertifikasi juga sangat diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Saat ini, hanya sekitar 600 orang yang tersertifikasi dari kebutuhan LKPP yang mencapai 4.000 orang. “Kita perlu memastikan bahwa LKPP memiliki SDM yang cukup dan berkualitas untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa SDM yang memadai, upaya pemberantasan korupsi dan pengadaan yang transparan akan sulit tercapai,” tutup Bang Kholid. Ia menekankan perlunya perhatian serius terhadap pengembangan SDM di LKPP untuk mencapai tujuan yang diharapkan.



Foto: PLH Kepala LKPP beserta jajarannya

FIT AND PROPER TEST KAP LAPORAN KEUANGAN BPK, BANG KHOLID: PERKUAT GOOD GOVERNANCE BPK UNTUK JAGA KEPERCAYAAN PUBLIK!

November 2024



Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, mengungkapkan sikapnya terkait pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPR RI telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu Karsono Soewito dan Rekan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2024. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (12/11/2024).



Good governance merupakan **pilar utama** yang mendasari pelayanan publik yang efektif dan transparan. oleh karena itu **BPK harus berkomitmen untuk menjadi teladan** dalam menerapkan prinsip-prinsip **good governance**, sehingga **dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat** dan memastikan akuntabilitas dalam **setiap aspek pengelolaan keuangan negara**.

—Bang Kholid



Sebagai lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan mengaudit pengelolaan keuangan negara, BPK memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Bang Kholid mengingatkan bahwa keberhasilan audit KAP terhadap BPK akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk mendukung proses ini dengan transparansi dan integritas. Bang Kholid menekankan perlunya kolaborasi yang kuat antara BPK, KAP, dan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Kita harus memastikan bahwa audit ini tidak hanya prosedural formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi tata kelola keuangan negara, terutama dalam mengatasi kebocoran anggaran dan mengelola utang yang meningkat,”

tutup Bang Kholid.

BANYAK BPR YANG DILIKUIDASI, BANG KHOLID MINTA LPS RESPONSIF JAGA KEPERCAYAAN PUBLIK KE LEMBAGA PERBANKAN

November 2024



“Transmisi antara kondisi ekonomi domestik dan global berlangsung sangat cepat, terutama di sektor keuangan. LPS perlu proaktif dalam mengidentifikasi risiko yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

Bang Kholid juga menyoroti fakta bahwa sekitar 93,1% aset LPS terinvestasi dalam surat berharga negara (SBN). Ia mengingatkan bahwa fluktuasi yang signifikan di pasar Surat Berharga Negara (SBN) atau fenomena capital outflow menjadi perhatian yang serius. “Apa langkah yang akan diambil LPS untuk memitigasi risiko yang timbul dari situasi ini? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus dijawab,” tambahnya. Bang Kholid menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko yang efektif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

Dalam Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rabu, 20 November 2024,

anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Bang Kholid, menyampaikan kritik dan evaluasi terkait kinerja LPS, khususnya dalam memahami hubungan antara kondisi ekonomi domestik dan situasi global. Bang Kholid menegaskan bahwa LPS harus mampu menganalisis lanskap ekonomi global saat ini dan melakukan penilaian terhadap risiko yang mungkin muncul.

“

Tingginya tingkat Non Performing Loan (NPL) gross dari bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) yang mencapai 11,27%,

kemudian ada 15 BPR/S yang dicabut izin usahanya, serta ada 17 BPR/S Dalam Likuidasi (BDL) sampai di triwulan III 2024

menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap sektor ini. LPS harus bergerak cepat dengan proses yang transparan, akuntabel, sehingga risiko bisa dimitigasi.

—Bang Kholid



Foto: Ketua Dewan Komisiner LPS dan Anggota Dewan Komisiner dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI

BANG KHOLID DORONG BPK UNTUK LAKUKAN TEROBOSAN DALAM AUDIT DI SISI PENERIMAAN NEGARA AGAR BISA MENDONGKRAK RASIO PAJAK!

November 2024



Bang Kholid dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa audit seharusnya tidak hanya berfokus pada sisi pengeluaran, tetapi juga perlu memperhatikan sisi penerimaan. BPK harus mengarahkan perhatian mereka pada aspek ini untuk meningkatkan rasio pajak. Dengan memperkuat fokus audit ke sisi penerimaan, BPK dapat membantu memastikan bahwa semua potensi pendapatan negara dapat dimaksimalkan dan dikelola dengan lebih efektif.

Selain itu, penting untuk menekan kebocoran yang disebabkan oleh penghindaran dan penggelapan pajak. Dengan mengidentifikasi dan menindak tegas praktik-praktik ini, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat keuangan negara, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak.

“

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu memperkuat upaya (extra effort) kewenangan audit yang fokus pada sisi penerimaan negara.

BPK diharapkan bisa membantu Kementerian Keuangan menekan dan memitigasi praktek-praktek penghindaran dan penggelapan pajak.

Masih banyak sektor-sektor ekonomi yang belum optimal digali penerimaan pajaknya.

—Bang Kholid



BANG KHOLID SOROTI TINGGINYA TINGKAT INEFISIENSI INVESTASI DI INDONESIA, DORONG EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR BUMN

November 2024

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI pada Selasa, 19 November 2024,

Bang Kholid mengkritik kinerja PT Sarana Multigriya Finansial, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menyoroti tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,3.



Menurutnya, angka ini menunjukkan bahwa efisiensi investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masih rendah. “Angka ICOR yang tinggi ini harus menjadi perhatian serius, terutama bagi BUMN yang mengelola pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Investasi besar tanpa hasil yang signifikan justru menjadi beban bagi ekonomi kita,” ujar Bang Kholid dalam pernyataan resminya.



Kita harus memastikan bahwa infrastruktur bukan hanya sekadar dibangun, tetapi juga harus berkualitas, efisien atau tidak boros dan mampu memberikan efek pengganda yang besar bagi kemajuan perekonomian nasional.

—Bang Kholid

Bang Kholid mendesak BUMN untuk segera mengevaluasi proyek-proyek investasi infrastruktur yang ada. Ia menegaskan pentingnya penerapan cost-benefit analysis dalam setiap proyek untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif.

Bang Kholid mendorong BUMN untuk lebih aktif memanfaatkan skema pembiayaan inovatif seperti public-private partnership (PPP) agar tidak terlalu bergantung pada utang berbunga tinggi. Menurutnya, peningkatan efisiensi investasi sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



SOSIALISASIKAN EMPAT PILAR MPR RI, BANG KHOLID: RAWAT DEMOKRASI KITA

November 2024

Pada tanggal 24 November 2024, Anggota DPR RI, Bang Kholid, mengadakan sosialisasi mengenai Empat Pilar MPR RI di Aula Daima Suites Margonda, Kota Depok. Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta, terutama pemuda-pemudi dari Kota Depok, Jawa Barat. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dengan pembukaan yang dipandu oleh MC, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan doa. Bang Kholid menekankan bahwa Pancasila adalah konsensus dasar yang menyatukan bangsa Indonesia, terutama saat menghadapi tantangan besar seperti krisis ekonomi 1998, yang memicu reformasi politik besar dan mengubah banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.



“

Spirit reformasi dan amandemen konstitusi di Indonesia telah membawa perbaikan signifikan dalam praktik demokrasi dan desentralisasi. Namun, gejala kemunduran demokrasi (democratic setback) dan resentralisasi yang muncul belakangan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi ke depan.

Untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang kuat, penting bagi kita untuk memitigasi fenomena ini melalui penguatan institusi demokrasi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil.

Dalam sesi pembahasan, Bang Kholid menjelaskan bahwa perubahan politik pasca-reformasi membawa Indonesia menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka, di mana kekuasaan Presiden kini dibatasi dan DPR RI berfungsi sebagai lembaga legislatif yang memiliki hak untuk membuat undang-undang. Ia juga membahas isu-isu penting yang diangkat oleh peserta, seperti program Universal Health Coverage (UHC) dan RUU Ekonomi Syariah yang diusulkan oleh Fraksi PKS DPR RI. Bang Kholid menekankan pentingnya peraturan Pilkada yang harus sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

KUNJUNGAN DIPLOMASI KE KANTOR WAKIL WALI KOTA LONDON DAN LEMBAGA THINK TANK CORDOBA FOUNDATION

Desember 2024



Kunjungan diplomasi Fraksi PKS DPR RI ke Kantor Wakil Wali Kota London Maium Talukdar merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Delegasi Fraksi PKS DPR RI bertemu dengan Wakil Wali Kota London untuk membahas berbagai isu strategis, seperti isu energi terbarukan, perubahan iklim, pembangunan transportasi, dan juga belajar tentang demokrasi dan keberagaman. Komunitas muslim Inggris yang tinggal di London cukup signifikan jumlahnya. Meskipun merupakan kelompok minoritas, tetapi komunitas muslim di Inggris memiliki peran besar dalam kepemimpinan di London. Walikota dan Wakil Walikota London adalah warga keturunan imigran muslim. Ini tentu merupakan fenomena menarik yang penting, bagaimana komunitas muslim bisa berkiprah memimpin kota global seperti London. Fraksi PKS juga banyak belajar tentang mengelola demokrasi yang murah dan terjangkau bagi semua pihak. Demokrasi menghadirkan wakil-wakil rakyat yang punya kapasitas, integritas, dan bebas dari money politics.

Selain itu, Fraksi PKS juga bersilaturahmi ke Indonesian Islamic Center, East London Mosque, dan Cordoba Foundation yang merupakan salah satu think tank komunitas muslim terkemuka di London. Dalam kunjungan tersebut, delegasi Fraksi PKS mendapat banyak pertanyaan terkait peran Indonesia dalam melakukan advokasi dan perjuangan misi perdamaian di dunia Islam seperti di Palestina, Suriah, Rohingya, Kashmir, dan Afghanistan. Fraksi PKS menegaskan bahwa parlemen dan pemerintah Indonesia memiliki satu sikap yang sama untuk mengedepankan misi perdamaian dan kemanusiaan di daerah-daerah konflik tersebut.

Kunjungan Fraksi ini dipimpin oleh Dr. Sukamta, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI yang juga Anggota Komisi I DPR RI.

1. Dr. H. Sukamta (A-471) Pimpinan Delegasi
2. H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. (A-463)
3. H. Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E. (A-482)
4. Hj. Nevi Zuairina (A-440)
5. Ir. H Ateng Sutisna (A-461)
6. H. Hendry Munief, M.B.A (A-441)
7. Izzudin Alqassam Kasuba (A-467)
8. H. Muhammad Kholid, S.E., M.Si. (A-458)



Dari kota London kita belajar tentang peran komunitas muslim yang adaptif, solutif, dan kontributif dalam pembangunan kota global yang maju, inklusif, dan beradab.

—Bang Kholid



Berawal dari sebuah keresahan sebagian anak muda yang biasa terjun mengurus anak-anak muda di kota Depok, memiliki segudang ide untuk berkarya namun tidak diberi ruang dan sulit mendapat akses fasilitas. Sehingga banyak karya terbaik terputus begitu saja. Lalu tercetuslah Kholid Academy yang merupakan wadah kreasi yang didirikan oleh Anggota DPR RI Komisi XI Muhammad Kholid, yang berfokus pada pengembangan hard skills dan soft skills bagi generasi muda, supaya mereka dapat berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan di era modern saat ini.

Kholid Academy diresmikan pada tanggal 24 November 2024 di Kota Depok, Jawa Barat.



Kholid Academy bergerak pada 4 bidang

- EDUCATION & SCHOLARSHIP
- JOB & CAREER
- LEADERSHIP & SOFT SKILLS
- UMKM & ENTREPRENEURSHIP

Sejak Oktober 2024, tim Kholid Academy selalu berupaya dan berkomitmen menghadirkan berbagai program yang dirancang untuk memberdayakan anak muda dalam berkarya dan meningkatkan kemampuan mereka, diantaranya sebagai berikut :

1. Kholid Academy Talks (KA Talks)

Sebuah forum yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif nasional dalam berbagi wawasan dan pengalaman hidup mereka kepada anak muda, seperti dr. Gamal Albinsaid dan Ilham Akbar Habibie.

2. Advokasi Beasiswa Kuliah

Sebanyak 86 mahasiswa di Kota Depok telah mendapatkan beasiswa melalui advokasi Bang Kholid. Di samping itu para anak asuh (penerima beasiswa) juga mendapatkan fasilitas mentoring pekanan dari para coach Kholid Academy .

3. Insightful Workshop

Workshop yang sudah dijalankan sejauh ini adalah Elevate Excel, yaitu kelas pelatihan microsoft excel yang berguna untuk meningkatkan skill mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel mereka di dunia kerja.

4. Fun Sport

Demi meningkatkan solidaritas, semangat kebersamaan dan kebugaran fisik, Kholid Academy memfasilitasi anak muda dengan kegiatan olahraga, seperti Fun Futsal.

“
 Saya sangat bersyukur atas advokasi Bang Kholid untuk program beasiswa di STT Nurul Fikri, yang memungkinkan saya melanjutkan pendidikan tanpa beban biaya. Dukungan beliau tidak hanya memberi kesempatan belajar, tetapi juga memotivasi saya untuk berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat.
 Faqih (Anak Asuh), Mahasiswa STT Nurul Fikri, Semester 3



KHOLID ACADEMY: ADVOKASI DAN BEasiswa UNTUK ANAK-ANAK DI KOTA DEPOK DAN KOTA BEKASI

November 2024

Kholid Academy telah berhasil melaksanakan program advokasi dan pemberian beasiswa kepada anak-anak yang menjadi binaan kami. Melalui program ini, kami tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan motivasi bagi anak-anak untuk mengejar impian mereka.



Kami menerima testimoni yang sangat menginspirasi dari empat anak dan orang tua mereka, yang menceritakan bagaimana beasiswa ini telah mengubah hidup mereka. Salah satu anak menyatakan, “Dengan beasiswa ini, saya bisa melanjutkan sekolah tanpa khawatir tentang biaya. Saya berterima kasih kepada Kholid Academy yang telah membantu saya mencapai cita-cita saya.”

Keberhasilan program advokasi dan beasiswa ini tidak hanya terlihat dari peningkatan jumlah penerima beasiswa, tetapi juga dari semangat dan tekad anak-anak untuk belajar dan berprestasi. Kami berharap, dengan dukungan yang terus menerus dari Kholid Academy, anak-anak ini dapat meraih cita-cita mereka dan menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini agar lebih banyak anak-anak dan remaja mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan yang lebih baik.



Selain itu, Kholid Academy juga berkomitmen untuk memberikan advokasi beasiswa kuliah bagi anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Melalui program ini, kami memberikan informasi dan dukungan kepada para pelajar tentang berbagai pilihan beasiswa yang tersedia, serta membantu mereka dalam proses pendaftaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada anak muda yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan hanya karena masalah finansial.

Galeri Kegiatan Reses



Newsletter Team :

Supervisor : Muhammad Kholid | **Editor in Chief :** Ahmad Fauzi | **Photographer :** Ibrahim Ayasy | **Graphic Designer :** Nabilah Mardiyah | **General Affairs :** Abizar Garibaldi

““

Saya mengapresiasi diterbitkannya *booklet* laporan kinerja Bang Kholid sebagai Anggota DPR-RI dari PKS. *Booklet* ini memaparkan secara baik mengenai kinerja sebagai Anggota DPR-RI, mulai dari daftar mitra kerjanya di Komisi terkait, rapat kerja dan dengar pendapat, hingga agenda temu konstituen berupa reses, serap aspirasi, dan sosialisasi 4 Pilar MPR-RI, dan tentu saja keberanian beliau berkiprah membela masalah Bangsa dan Negara dengan menolak/mengkritisi pemberlakuan PPN 12%, yang *alhamdulillah* didengarkan oleh Pemerintah.

Penerbitan *booklet* ini menjadi angin segar diseminasi informasi kepada masyarakat luas, di mana Partai Keadilan Sejahtera asal Partai dari Bang Kholid, sebagai Partai dengan peringkat Indeks Pelembagaan Partai tertinggi (BRIN, 2024), tentu PKS melalui Fraksinya terus mendorong agar para kadernya di Parlemen untuk mengedepankan transparansi publik, salah satunya dengan penerbitan/publikasi kinerjanya seperti yang sekarang dilakukan Bang Kholid. Selamat kepada Bang Kholid atas laporan kinerja 3 bulan pertamanya sebagai Anggota DPR-RI, semoga jadi sunnah hasanah (tradisi yang baik) dan beliau terus konsisten agar semakin menguatkan ikatan dengan konstituennya, dan menyemangatnya untuk hadirkan kinerja kedewanan yang lebih baik pada masa-masa sidang berikutnya.

Barakallahu fiikum.

Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A.
Wakil Ketua MPR RI

““

Saya mengenal Bang Kholid sebagai sosok dengan integritas yang tinggi dan niat yang mulia untuk mengawal berbagai kebijakan Pemerintah agar selalu memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Dalam beberapa kali berinteraksi dengan Bang Kholid, saya mengagumi bagaimana beliau selalu mendasarkan pendapatnya pada berbagai latar belakang atau referensi teori dan implementasi Pembangunan Ekonomi selama ini. Basis ilmu kebijakan publik yang dimiliki juga memperkuat argumen di setiap pendapatnya.

Bang Kholid menunjukkan kepada kita bahwa komitmen dalam mendorong Pembangunan Ekonomi yang inklusif (melalui peranan di Parlemen) sangat dibutuhkan agar Bangsa Indonesia dapat lebih sejahtera dan tahan terhadap berbagai situasi perekonomian.

Andry Asmoro
Chief Economist Bank Mandiri

““

Layaknya anak panah yang terlepas dari busurnya, Bang Kholid langsung melesat menjulang tinggi menjemput amanat berbagai tugas untuk negeri. Bang Dewan tampaknya menyadari untuk apa dia di DPR RI berkiprah tegak berdiri. Dengan usia muda dan penuh energi beliau melahap semua tugas dengan semangat, profesional, ramah dan percaya diri. Persis sebagaimana yang saya kenal selama ini. Semoga tetap konsisten memanggul amanat penderitaan rakyat dari hari ke hari. Dan semoga tetap ikhlas membela seluruh anak negeri dalam naungan rida Illahi.

Prof. Firman Noor, Ph.D.
Profesor Riset BRIN



PENGUASA

lebih membutuhkan

KRITIKAN

daripada

PUJIAN

karena

KRITIKAN SEPERTI VITAMIN

yang terkadang

PAHIT TAPI MENYEHATKAN,

sedangkan

PUJIAN SEPERTI LEMAK

yang

ENAK DIMAKAN

tapi justru

TIDAK MENYEHATKAN

- BANG KHOLID -

““

Pertama kali memimpin rapat di Komisi XI DPR RI periode 2024 — 2029, saya memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bang Kholid sangat substansial, mendalam dan memberikan sebuah pemahaman baru tentang keberpihakan dari sisi politik. Anak muda yang cerdas, dimana awal periode masa persidangan sudah langsung membahas isu dengan sangat serius disampaikan dengan resonansi yang jelas sehingga tampilannya seakan-akan sudah beberapa periode di DPR karena paham substansi dan berdiskusi soal solusi. Saya sangat senang dengan anggota Komisi yang ekspresi politiknya kuat dan berpihak pada kepentingan negara seperti Bang Kholid.

Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.**Ketua Komisi XI DPR RI-Anggota Fraksi Partai Golkar**

““

Bang Kholid adalah seorang Legislator yang telah menggunakan intelektualitas secara cerdas-spiritual sehingga dalam diskusi (di Baleg), pesan-pesannya selalu terdistribusi dengan baik. Dan kami selaku pimpinan sangat beruntung Bang Kholid bergabung di Baleg DPR RI.

Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.**Ketua Baleg DPR RI-Anggota Fraksi Partai Gerindra**

““

Sosok yang berani untuk lugas, kritis dan objektif demi mengupayakan solusi yang terbaik dan *do-able*. OJK siap bermitra erat membawa kemajuan negeri.

Mahendra Siregar**Ketua Dewan Komisiner OJK**

““

Bang Kholid adalah salah satu adik kelas yang terbaik di FEB UI yg terjun ke dunia politik. Sebagai politisi muda, Bang Kholid menunjukkan kematangan dalam bertindak dan berfikir. Pemahaman Bang Kholid terhadap substansi di setiap Rapat Kerja yang saya hadiri, membuat berbagai komentar dan pertanyaannya sangat berkualitas dan berbobot. Bangga melihat adik kelas yang hebat ini. Bang Kholid adalah salah satu contoh politisi muda yang terbaik yang tentunya bisa menjadi contoh bagi politisi-politisi muda lainnya yang akan berkiprah di Parlemen sebagai wakil rakyat.

Destry Damayanti**Deputi Gubernur Senior BI**